



Sekolah lakukan pembinaan siswa

Harian Jogja, Sabtu (18/6).

Yodie Hardiyanto
HARIAN JOGJA

JOGJA—Kebijakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah bagi pemegang Kartu Menuju Sejajtera (KMS) didukung oleh sejumlah kepala sekolah di Kota Jogja. Kebijakan ini didukung karena memberikan kesempatan kepada warga yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di sekolah favorit.

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Kota Jogja, Timbul Mulyono, mengatakan ia mendukung Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja dalam menerapkan kebijakan ini. Namun, menurutnya, kebijakan ini juga perlu disertai bagi pembinaan siswa yang keluarganya memegang KMS.

"Kebijakan ini juga perlu dievaluasi," kata Timbul kepada *Harian Jogja*, Sabtu (18/6). Menurut Timbul, satu siswa yang keluarganya memegang KMS di SMAN 10 pada tahun ajaran 2009/2010 telah keluar dan satu lagi tidak naik kelas. "Perlu ada pembinaan," kata Timbul.

Pembinaan itu, maksud Timbul, ditujukan bagi siswa yang keluarganya memegang KMS agar tidak minder dengan peserta didik yang lain. Karena dikhawatirkan terjadi perasaan tidak nyaman atau sulit bergaul dengan rekan-rekan sekolahnya yang memiliki kemampuan ekonomi di atasnya.

Menurut Timbul, juga perlu ada peningkatan anggaran bagi siswa yang keluarganya memegang KMS. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu melakukan evaluasi kebutuhan peserta didik tersebut dan diajukan ke Disdik Kota Jogja.

Pada tahun ajaran 2009/2010 kuota bagi pemegang KMS yang bisa masuk SMAN 10 adalah 17 orang. Tahun ini, kuotanya hanya 12. Senada, Kepala SMAN 6 Kota Jogja, Rubiyanto, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan ini. "Kita ikut program yang digelar Pemkot ini," kata Rubiyanto.

Menurutnya, kebijakan ini ditujukan bagi siswa yang kondisi ekonominya kurang baik atau memiliki keterbatasan.

Menurut Rubiyanto, sebelum masuk sekolah, para peserta didik yang masuk lewat jalur KMS diberi pengertian dan pengarahan agar bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Karena, tidak menutup kemungkinan, mereka akan minder. Tahun ajaran kali ini kuota bagi pemegang KMS yang akan mendaftar di SMAN 6 adalah 13 orang. Tahun ajaran sebelumnya adalah 12 orang.

Akses pendidikan

Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah, Disdik Kota Jogja, Mawardi Dalga, mengatakan kebijakan PPDB menggunakan KMS yang ditujukan bagi warga Kota Jogja yang kurang mampu ini bertujuan agar mereka bisa mengakses pendidikan seperti warga lainnya.

"Pendidikan tidak hanya bagi golongan mampu," kata Mawardi. Namun, menurutnya, bagi para pemegang KMS yang hendak mendaftar anggota keluarganya ke sekolah bukan hanya perlu melihat kuota tapi juga rentang nilai.

"Jangan memaksakan diri di sekolah favorit," katanya. Menurut Mawardi, anggota keluarga juga perlu cermat melihat tujuan sekolah. Misalnya, keluarga tersebut tinggal di Jogjakota wilayah Utara, jangan mendaftarkan anaknya di sekolah wilayah Selatan. Hal itu akan berpengaruh terhadap ongkos transportasi anak itu.

Kuota yang sudah ditetapkan bagi KMS untuk masuk ke sekolah negeri, menurutnya tidak akan berubah. Karena kuota itu adalah hasil perhitungan. Kecuali, ujarnya, kuota KMS di suatu sekolah tidak dipenuhi, kursi yang kosong itu bisa ditujukan untuk warga lainnya.

"Enggak mungkin kami kosongkan," kata Mawardi. Menurut Mawardi, Disdik Kota telah melakukan sosialisasi PPDB bagi pemegang KMS sejak 13 Mei hingga 14 Juni. "Sosialisasi di 45 kelurahan," katanya. Peserta sosialisasi itu sebanyak 2.475 orang tua dan 2.083 di sekolah-sekolah.

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Din. Pendidikan</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. <u>UPT. JPD</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. JPD			

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005